

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN KECAMATAN SUNGAI APIT AKIBAT REKAYASA SOSIAL PANDEMI COVID-19
Social Changes Of Fisheries Community In Sungai Apit Subdistrict Due To Pandemi Social Engineering Covid-19

Fanny Septya, Tomi Ramadona*, Darwis AN dan Rindi Metalisa

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Diterima tanggal: 11 Desember 2020; Diterima setelah perbaikan: 2 Desember 2021

Disetujui terbit: 21 Juni 2022

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 disikapi dengan berbagai bentuk rekayasa sosial, seperti pembatasan sosial berskala besar dan menengah, kebijakan sekolah dan bekerja dari rumah, serta penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut melahirkan perubahan sosial yang direncanakan dengan hasil akhir yang diharapkan adalah terputusnya mata rantai penyebaran Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi faktor penggerak perubahan sosial, (2) mengidentifikasi rekayasa sosial (program pemerintah) yang diterima masyarakat nelayan Kecamatan Sungai Apit pada masa pandemi Covid-19, dan (3) mengidentifikasi bentuk perubahan sosial masyarakat nelayan Kecamatan Sungai Apit akibat pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah *in-depth interview* dengan informan kunci serta studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder terkait indikator perubahan sosial. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penggerak perubahan sosial berasal dari eksternal masyarakat/faktor eksogen, yakni program dan kebijakan pemerintah (BLT Covid-19, PSBB, serta pemberlakuan sekolah dan bekerja dari rumah) sebagai bentuk rekayasa sosial yang memengaruhi perubahan sosial masyarakat nelayan. Bentuk perubahan sosial yang terjadi adalah perubahan jenis kegiatan produktif, tingkat kesejahteraan, dan budaya atau gaya hidup masyarakat. Rekayasa sosial pada masa Covid-19 tidak menyebabkan perubahan pada struktur masyarakat nelayan, tetapi perubahan pada budaya masyarakat.

Kata Kunci: masyarakat nelayan; rekayasa sosial; perubahan sosial; BLT Covid-19; faktor penggerak

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has been addressed with various forms of social engineering such as large and medium-scale social restrictions, school policies and work from home and the application of health protocols. This gave birth to planned social changes with the expected end result being the discontinuation of the chain of the spread of Covid-19. The objectives of this study were (1) to identify the driving factors for social change, (2) to identify social engineering (government programs) received by the fishers community of Sungai Apit Subdistrict during the Covid-19 pandemic and (3) identify the form of social change in the fishers community of Sungai Apit Subdistrict due to the Covid-19 pandemic and the accompanying social engineering. The method used in this research is a qualitative approach. The primary data collection technique was in-depth interviews with key informants and a literature study was conducted to collect secondary data related to indicators of social change. The method of data analysis is descriptive qualitative. The results of the analysis show that the driving factors for social change come from external community/exogenous factors, namely government programs and policies (BLT Covid-19, PSBB and implementation of school and work from home) as a form of social engineering that affects social change in fishers communities. The form of social change that occurs is a change in the type of productive activity, the level of welfare and the culture or lifestyle of the community. Social engineering during the Covid-19 period did not cause changes to the structure of the fishers community, but rather a change in the culture of the community.

Keywords: fisheries community; social engineering; social change; BLT Covid-19; driving actors

*Korespondensi Penulis:

email: tomi.r@lecturer.unri.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v17i1.9456>

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu (Leat, 2005). Setidaknya terdapat tiga kunci utama dalam perubahan sosial, yakni terjadi perubahan keadaan, pada waktu tertentu, dan pada status sosial yang sama atau status sosial tertentu. Jika merujuk pada konsep perubahan sosial yang menitikberatkan pada perubahan struktur yang berimbang pada perubahan sistem, hal tersebut tidak serta-merta terjadi pada masyarakat nelayan di masa pandemi Covid-19. Namun, proses sosial dengan dukungan rekayasa sosial penanganan pandemi Covid-19 tetap menghasilkan perubahan keadaan (pola perilaku) di masyarakat nelayan, yakni peningkatan interaksi keluarga nelayan dengan dunia digital sebagai bentuk adaptasi kebijakan sekolah dari rumah serta pola hidup sehat sebagai hasil dari proses sosial yang disadari dan diharapkan. Struktur ekonomi masyarakat nelayan tidak mengalami perubahan (Gundelund & Skov, 2021). Nelayan tetap menjadi mata pencaharian utama dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan yang memiliki kekhasan berdasarkan sifat pekerjaan nelayan yang penuh tantangan, bergantung pada musim, dan identik dengan kemiskinan, khususnya pada kelompok nelayan dengan kepemilikan aset melaut yang terbatas akibat risiko dan ketidakpastian pada mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap. Akibatnya, terbentuk fenomena sosial masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang meskipun tergolong rumah tangga miskin, tetapi termasuk kelompok masyarakat yang tangguh menghadapi perubahan-perubahan, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan.

Pandemi Covid-19 disikapi oleh pemerintah dengan beberapa rekayasa sosial berupa PSBB (pembatasan sosial berskala besar), *physical distancing*, sekolah daring, bekerja dari rumah, dan penerapan protokol kesehatan dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus. Semua rekayasa sosial yang bertujuan membatasi ruang gerak dan kegiatan berkumpul tersebut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat dan membentuk pola hidup baru, yakni pola hidup sehat. Meskipun demikian, masyarakat nelayan umumnya tetap melakukan aktivitas melaut sesuai dengan musimnya dan tidak melakukan pembatasan kegiatan produktif yang menjadi sumber pencahariannya. Selain itu, tidak terdapat perubahan pada alat dan input melaut. Jalur

distribusi pemasaran tetap mengandalkan tauke/plasma sehingga besaran pendapatan tidak banyak berubah.

Kemiskinan yang identik dengan ekonomi rumah tangga nelayan juga masih melekat pada masa pandemi Covid-19. Situasi pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat nelayan untuk beraktivitas di rumah saja. Akan tetapi, bagi masyarakat nelayan, hal ini tidak memungkinkan karena mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga. Hal itu disebabkan pendapatan masyarakat nelayan hanya diperoleh dari profesi utamanya sebagai nelayan dengan ungkapan *tidak menangkap ikan, maka tidak makan*. Meskipun demikian, terdapat beberapa fenomena sosial yang terjadi di kalangan rumah tangga nelayan sebagai akibat rekayasa sosial tersebut, seperti kehilangan tambahan sumber pendapatan rumah tangga, peralihan pekerjaan dan mata pencaharian alternatif, hingga alokasi waktu dan peran istri nelayan sebagai hasil keputusan-keputusan ekonomi dalam rumah tangga nelayan. Keputusan-keputusan ekonomi tersebut merupakan upaya adaptasi (penyesuaian) dan mitigasi (pencegahan) rumah tangga nelayan terhadap fenomena pandemi Covid-19 yang membawa banyak perubahan pada tataran global yang memengaruhi kondisi lokal (Purnama *et al.*, 2020).

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat nelayan juga menjadi objek beberapa kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, seperti distribusi bantuan khusus Covid-19, baik berupa BLT maupun bantuan sembako, serta kebijakan sekolah daring. Kebijakan-kebijakan tersebut membentuk pola baru bagi ekonomi rumah tangga nelayan. Menurut teori sistem Auguste Comte (Pohan & Gunawan, 2019; Irwandi & Chotim, 2017), kebaruan tersebut akan membentuk proses dan perubahan sosial dengan hasil berupa perkembangan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi faktor penggerak perubahan masyarakat nelayan, (2) mengidentifikasi bentuk rekayasa sosial (program pemerintah) yang diterima masyarakat nelayan pada masa pandemi Covid-19, dan (3) mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan akibat rekayasa sosial pandemi Covid-19. Penelitian ini menunjukkan apa saja yang menjadi faktor penggerak perubahan sosial dan bagaimana faktor penggerak tersebut memengaruhi perubahan sosial pada masyarakat nelayan

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Penelitian dilaksanakan pada bulan April—November 2020. Penelitian difokuskan untuk melihat pola mitigasi, adaptasi, dan perubahan sosial yang mencakup perubahan struktur, perubahan kultural, dan perubahan tingkat kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat nelayan Sungai Apit sebagai dampak Covid-19. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu (1) Kecamatan Sungai Apit merupakan salah satu daerah pesisir di Provinsi Riau yang memiliki rumah tangga nelayan, khususnya perikanan tangkap; (2) posisi Kecamatan Sungai Apit tidak jauh dari ibu kota, Siak Sri Indrapura, yang dapat ditempuh dengan jalur darat sehingga dapat dikategorikan kawasan sekitar episentrum penyebaran Covid-19; dan (3) Kecamatan Sungai Apit juga menjadi salah satu lokasi transit dan pelabuhan yang menghubungkan daerah/negara tetangga sehingga juga memiliki peluang yang tinggi terhadap penyebaran Covid-19. Lokasi fokus penelitian berada pada pusat perikanan tangkap, yaitu Desa Teluk Batil, Desa Sungai Kayu Ara, Desa Bunsur, Desa Lalang, dan Desa Kayu Ara Permai.

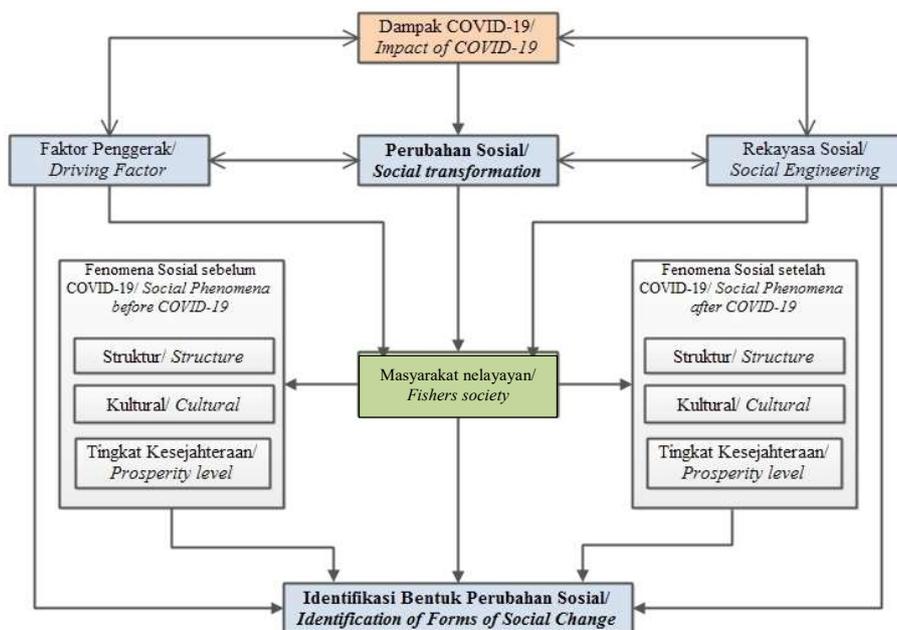
Jenis dan Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang diperlukan terdiri atas data

primer dan data sekunder. Beberapa metode yang dilakukan adalah metode observasi, wawancara mendalam, studi literatur, dan penelusuran data secara daring (*online*). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan dua kelompok informan kunci, yakni tokoh masyarakat (7 orang) dan rumah tangga nelayan (30 orang). Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat setempat (kepala desa dan tokoh nelayan), diperoleh informasi mengenai kondisi nelayan setempat akibat pandemi Covid-19 dan rekomendasi rumah tangga nelayan yang dipilih sebagai informan kunci. Kriteria nelayan tersebut adalah memperoleh BLT Covid-19 dan terdampak pandemi Covid-19 dari aspek ekonomi. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 30 nelayan sebagai informan kunci. Untuk mendukung analisis data primer, dilakukan studi literatur terkait rekayasa dan perubahan sosial. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah.

Metode Analisis Data

Data dan informasi terkait perubahan sosial dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menurut Disman *et al.* (2017), Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini menjelaskan kecenderungan, cara berpikir, dan perubahan yang terjadi pada subjek penelitian (nelayan) terhadap fenomena rekayasa sosial berupa program pemerintah dalam penanganan Covid-19, seperti kebijakan sekolah



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian (Figure 1. Research Framework)

dan bekerja dari rumah, PSBB, dan pemberlakuan protokol kesehatan. Sejumlah pertanyaan penelitian memerlukan unit data dan informasi untuk menjawab penelitian. Kemudian, dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang tipologi/jenis perubahan sosial yang terjadi, baik perubahan struktural, budaya, kesejahteraan ekonomi, maupun bentuk perubahan sosial lainnya yang terjadi sebagai dampak upaya adaptasi dan mitigasi masyarakat nelayan pada rekayasa sosial pandemi Covid-19. Hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan kebencanaan di tingkat lokal dan nasional seperti yang digambarkan pada kerangka pemikiran gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penggerak Perubahan Sosial Pada Masyarakat Nelayan di Masa Pandemi COVID-19

Faktor penggerak atau sumber perubahan sosial merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan yang terjadi pada masyarakat (Greenwood & Gunner, 2008). Berbagai program pemerintah dilakukan sebagai bentuk rekayasa sosial dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Program dan kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 tersebut memengaruhi cara pikir dan pola perilaku rumah tangga nelayan sehingga dinilai sebagai faktor penggerak terjadinya perubahan sosial. Faktor penggerak tersebut berasal dari luar (faktor eksogen) dan dari dalam (faktor endogen). Faktor endogen berasal dari internal diri masyarakat nelayan, baik kepala keluarga, istri, maupun anak pada rumah tangga nelayan sebagai aktor yang

melakukan adaptasi pada beragam fenomena sosial demi keberlangsungan hidup dan upaya untuk kehidupan yang lebih baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Faktor pendorong perubahan sosial yang berasal dari dalam diri masyarakat dibentuk dari kesadaran dan tanggung jawab pada individu sebagai bagian dari masyarakat sehingga melahirkan rasa tanggung jawab untuk beradaptasi menuju perkembangan yang lebih berkualitas (Qomarudin, 2013). Faktor eksogen adalah pendorong yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, baik pihak pemerintah maupun swasta, sebagai bentuk intervensi terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat (Pohan & Gunawan, 2019). Faktor penggerak dalam perubahan dan proses sosial tersebut diklasifikasikan dalam Tabel 1. Dalam teori perubahan sosial, biasanya digunakan istilah sumber perubahan sosial.

Terdapat beberapa pernyataan informan tentang faktor penggerak atau sumber perubahan sosial. Informan nelayan di Desa Lalang menyatakan bahwa PSBB (pembatasan sosial berskala besar) menurunkan penjualan ikan dan pendapatan nelayan sehingga mereka mencari tambahan sumber penghasilan dengan menjadi buruh tani. Rumah tangga nelayan lain di Desa Kayu Ara menyatakan bahwa sejak sekolah daring (*online*), pengeluaran rumah tangga mengalami peningkatan untuk pembelian kuota internet, sedangkan sebelumnya pengeluaran untuk internet tidak besar. Kemudian, nelayan di Desa Busur yang memiliki sumber mata pencaharian alternatif dari pihak istri sebagai guru TK honorer menyatakan bahwa WFH menyebabkan istrinya tidak lagi bekerja sebagai guru TK sebab sekolah diliburkan sehingga pendapatan rumah tangga mereka berkurang.

Tabel 1 Faktor Penggerak Perubahan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 (Table 1 Driving Factors for Social Change During the Covid-19 Pandemic)

No	Faktor Endogen (Endogenous Factors)	Faktor Eksogen (Exogenous Factors)
1	Kesadaran anggota rumah tangga untuk melakukan perubahan (<i>the awareness of household members to make changes</i>)	Program Pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat nelayan (<i>government programs aimed at Fishers communities</i>)
2	Tanggungjawab anggota rumah tangga untuk menambah sumber pendapatan (<i>the responsibility of household members to increase sources of income</i>)	Intervensi langsung oleh pemerintah (PSBB, Penerapan protokol kesehatan) (<i>direct government intervention (PSBB, Implementation of health protocols)</i>)
3	Tuntutan peningkatan pengeluaran rumah tangga (<i>demands for increased household expenditure</i>)	Kebijakan Pemerintah yang berlaku umum (Sekolah daring, WFH) (<i>general Government Policy (Online schools, WFH)</i>)

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020 (Source: data analysis results, 2020)

Identifikasi Rekayasa Sosial (Program Pemerintah) bagi Masyarakat Nelayan di Masa Pandemi COVID-19

Dalam rangka memutus mata rantai Covid-19, pemerintah melakukan rekayasa sosial dalam bentuk kebijakan dan program, seperti pemberlakuan PSBB dan pola hidup baru (*new normal*). PSBB yang diberlakukan berdasarkan peraturan gubernur telah berdampak pada penurunan penerimaan nelayan di Kecamatan Sungai Apit akibat penurunan hasil penjualan dan terbatasnya jangkauan pemasaran. Pola hidup baru dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (2020) dan pelaksanaan sekolah daring berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 membentuk pola perilaku baru pada rumah tangga nelayan. Sementara itu, kebijakan WFH (*work from home*) atau kerja dari rumah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tidak memberi perubahan pada struktur pekerjaan nelayan. Untuk menjelaskan bagaimana perubahan sosial terjadi pada masyarakat nelayan pada masa pandemi Covid-19, deskripsi data dalam tabel dibagi menjadi tiga waktu, yakni sebelum PSBB (sebelum diberlakukan PSBB sebagai konsekuensi terjadi pandemi Covid-19), saat diberlakukan PSBB, dan saat diberlakukan pola hidup baru (*new normal*). Tabel 2 menjelaskan program pemerintah, baik nasional maupun regional, yang fokus menangani kesejahteraan masyarakat yang dilakukan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Program peningkatan kesejahteraan yang diterima masyarakat nelayan di Kecamatan Sungai Apit terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan input melaut, dan BLT Covid-19. Informan kunci penerima program PKH setelah

PSBB mengalami peningkatan menjadi 33,33% dari keseluruhan informan atau lebih dari sepertiga informan kunci (11 orang) menjadi binaan PKH. Besaran bantuan program PKH bervariasi sesuai dengan jenis usaha produktif rumah tangga nelayan. Sehubungan dengan program pemerintah berupa bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang bertujuan menopang ekonomi rumah tangga, jika dikaitkan dengan perubahan sosial, terjadi perubahan hubungan antarsistem, yakni peran pemerintah menjadi lebih intens bagi penyelamatan ekonomi rumah tangga, termasuk rumah tangga masyarakat nelayan. Menurut Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020, BLT Covid-19 diberikan kepada seluruh warga masyarakat yang terdata sebagai penerima BLT di wilayah desa dengan besaran Rp600.000,00/kk. Informan kunci merupakan masyarakat nelayan yang terdata sebagai penerima BLT Covid-19. Bantuan tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, khususnya konsumsi pangan dan nonpangan. Sementara itu, bantuan input melaut selama pandemi Covid-19 belum digulirkan kembali dan hanya diakses oleh dua orang nelayan. Bantuan tersebut berupa bantuan alat tangkap. Program pemerintah yang fokus pada kesejahteraan ini belum menggerakkan perubahan sosial. Hal ini ditinjau dari belum adanya perubahan struktur ekonomi masyarakat yang mengarah ke arah yang lebih produktif. Dukungan kebijakan pemerintah berupa kebijakan ekonomi berkelanjutan diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan (Kadefak & Linke, 2021). Salah satu fasilitas pembiayaan yang mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pedesaan adalah asuransi pertanian dengan mekanisme dukungan pembiayaan pertanggungansian risiko kegagalan yang disebabkan kondisi ekonomi akibat Covid-19 (Bottema et al., 2021).

Tabel 2 Program Pemerintah yang Diterima Masyarakat Nelayan (Table 2 Government Programs Received by the Fishers' Community)

Program Pemerintah (Government Programs)	Persentase Penerima Sebelum Pandemi (Percentage Before Pandemic)	Persentase Penerima saat PSBB (Percentage at PSBB)	Persentase Penerima saat New Normal (Percentage at New Normal)
Program Keluarga Harapan (<i>hope family program</i>)	22.22	22.22	33.33
Bantuan Input Melaut (<i>input fishers assistance</i>)	5.56	0	0
Bantuan Langsung Tunai COVID-19 (<i>direct cash assistance for covid -19</i>)	0	100	100

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020 (Source: data analysis results, 2020)

Identifikasi Rekayasa Sosial (Program Pemerintah) bagi Masyarakat Nelayan pada Masa Pandemi Covid-19

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan bukan termasuk tipe perubahan struktur sosial yang menghasilkan banyak perubahan sistem dan fungsi pada masyarakat, melainkan perubahan sosial di tingkat individu dalam masyarakat nelayan, seperti perubahan tingkat interaksi sosial saat pemberlakuan PSBB, perubahan tingkat produktivitas *output* per kapita bagi rumah tangga yang kehilangan atau beralih mata pencaharian, serta perubahan individu secara global dalam hal budaya hidup sehat dan pembelajaran daring. Perilaku masyarakat nelayan pada umumnya tidak mengalami perubahan dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari kehidupan sosial dan masyarakat ekonomi meskipun diberlakukan berbagai rekayasa sosial. Rekayasa sosial pada dasarnya merupakan perubahan sosial yang direncanakan untuk membentuk proses sosial dengan hasil/tujuan tertentu (Alimah *et al.*, 2019). Pemerintah sebagai agen perubahan sosial yang direncanakan mengimplementasikannya dalam bentuk program pemerintah dan intervensi langsung (Kamim, 2018). Rekayasa sosial Covid-19 berupa program BLT Covid-19 dan intervensi langsung pemerintah melalui upaya-upaya pembatasan sosial skala besar dan menengah serta penerapan protokol kesehatan secara umum tidak sepenuhnya mengubah pola nafkah, interaksi, dan komposisi masyarakat nelayan. Penurunan hasil penjualan akibat pembatasan jangkauan pemasaran dan pembatasan aktivitas berkumpul hanya terjadi pada masa PSBB. Berikutnya, masyarakat nelayan tetap menjalani aktivitas, utamanya sebagai nelayan perikanan tangkap dengan suasana kekerabatan yang kental, tidak didominasi kompetisi, interaksi sosial yang tidak terganggu intervensi pemerintah yang membatasi kegiatan berkumpul, dan tetap bertahan di lokasi atau tidak melakukan migrasi akibat pandemi. Dengan demikian, struktur, fungsi, dan komposisi masyarakat yang tetap tersebut tidak membentuk perubahan pada tatanan masyarakat (Umanailo, 2019). Namun, terdapat jenis perubahan sosial lain yang terjadi pada masyarakat nelayan di Kecamatan sungai Apit akibat pandemi Covid-19 dan rekayasa sosial yang menyertainya. Rekayasa sosial yang dimaksud adalah seperangkat kebijakan dan peraturan yang dibuat secara sengaja pada masa pandemi Covid-19 untuk mencapai suatu

kondisi yang diinginkan, yakni terputusnya mata rantai Covid-19. Perubahan sosial tersebut menuju sebuah proses sosial yang mengarah pada tujuan tertentu, yakni kondisi perekonomian rumah tangga nelayan. Perubahan sosial yang terjadi adalah perubahan kegiatan produktif dan perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan.

A. Perubahan Kegiatan Produktif Rumah Tangga Nelayan

Faktor endogen yang menjadi faktor penggerak dalam perubahan dan proses sosial masyarakat nelayan adalah keputusan ekonomi rumah tangga dalam mengoptimalkan peran anggota keluarga, baik kepala keluarga, istri, maupun anak, dalam mengupayakan pendapatan tambahan bagi rumah tangga tersebut melalui mata pencaharian alternatif. Faktor endogen tersebut membentuk keputusan-keputusan ekonomi dalam rumah tangga nelayan. Sebanyak 5,56% responden memiliki pola nafkah istri sebagai sumber pendapatan tambahan, yakni sebagai guru TK honorer. Pada masa pandemi Covid-19 pekerjaan tersebut tidak berjalan akibat kebijakan sekolah daring. Hal tersebut memengaruhi keputusan rumah tangga dalam mengupayakan mata pencaharian lain oleh kepala keluarga. Kemudian, sebagian rumah tangga nelayan tidak melakukan pekerjaan tambahan dengan pertimbangan dukungan BLT Covid-19 dinilai cukup untuk menguatkan ekonomi rumah tangga, terlebih jika didukung penguatan peran pemerintah lokal dalam mengarahkan masyarakat dalam mengelola BLT menjadi usaha produktif sehingga memiliki aspek keberlanjutan program. Perubahan pada kegiatan produktif rumah tangga nelayan dijelaskan pada Tabel 3.

Merujuk pada tabulasi kegiatan produktif rumah tangga nelayan, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan sosial di tingkat individu pada masyarakat nelayan. Sebanyak empat kepala keluarga (11,1% dari responden) memilih profesi sebagai buruh tani dan buruh kebun sebagai mata pencaharian alternatif. Hal ini merupakan bentuk mobilitas sosial secara horizontal karena terjadi peralihan atau pemilihan alternatif pekerjaan dari nelayan menjadi buruh kebun. Nelayan dan pekebun merupakan pekerjaan pada level yang sama, yakni bergantung pada pertanian primer skala kecil dengan ciri khas pelakunya minim kepemilikan input produksi, minim keahlian, dan

Tabel 3 Perubahan Kegiatan Produktif Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19
(Table 3 Changes in Household Productive Activities During the Covid-19 Pandemic)

Kegiatan Produktif Rumah tangga (Household Productive Activities)	Persentase Sebelum Pandemi (Percentage Before Pandemic)	Persentase saat PSBB (Percentage at PSBB)	Persentase saat New Normal (Percentage at New Normal)
Mata pencaharian utama KK (main livelihood)			
Nelayan (<i>Fishers</i>)	100	100	91.67
Mata Pencaharian sampingan KK (family secondary livelihoods)			
Buruh sawit (<i>oil palm workers</i>)	11.11	11.11	11.11
Petani (<i>farmer</i>)	11.11	11.11	11.11
Mata Pencaharian Istri (wife's livelihood)			
IRT (<i>housewife</i>)	77.78	100	100
Guru (<i>teacher</i>)	5.56	0	0
Asisten Rumah tangga (<i>housemaid</i>)	5.56	5.56	5.56
Pedagang Kecil (<i>small trader</i>)	11.11	11.11	11.11
Mata Pencaharian Anak (children's livelihoods)			
Buruh Angkut (<i>transport workers</i>)	0.00	5.56	5.56

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020 (Source: data analysis results, 2020)

minim modal sehingga belum terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan. Namun demikian, tuntutan akan tambahan pendapatan telah mendorong masyarakat nelayan menciptakan mata pencaharian heterogen yang berpotensi menimbulkan mobilitas sosial (Gunawan *et al.*, 2015).

Selain kepala keluarga, pelibatan anggota keluarga yang lain (istri dan anak) juga terjadi di sebagian kecil keluarga nelayan, baik sebagai guru TK, ART, pedagang kecil (pekerjaan istri), maupun buruh angkut (pekerjaan anak). Pada masa pandemi Covid-19, sebagian istri nelayan kehilangan pekerjaan sebagai guru TK karena adanya kebijakan sekolah dari rumah secara daring dan peniadaan sekolah tatap muka. Dengan demikian, tidak terdapat lagi penghasilan tambahan rumah tangga nelayan yang bersumber dari honorarium guru TK (pendapatan rumah tangga berkurang). Pada rumah tangga lain, terdapat keputusan keluarga untuk mempekerjakan anaknya sebagai buruh angkut untuk menambah sumber pendapatan rumah tangga. Keputusan rumah tangga tersebut merupakan produk pola pikir dan pola perilaku individu yang adaptif terhadap perubahan yang

terjadi (Herdiana, 2019). Rekayasa sosial pandemi Covid-19 yang makin mengurangi peluang bekerja di luar rumah bagi perempuan memungkinkan menjadi peluang untuk mata pencaharian alternatif rumah tangga yang dilakukan kaum istri sehingga mampu meningkatkan produktivitas perempuan (Septikawati & Habsari, 2014). Produktivitas perempuan dalam membuka sumber pendapatan baru bagi rumah tangga nelayan mengindikasikan bahwa perubahan sosial juga membawa perubahan bagi relasi gender pada masyarakat perikanan (Hikmah, 2018). Oleh karena rekayasa sosial pada masa pandemi Covid-19 belum menyentuh pembangunan fisik, perubahan sosial yang terjadi belum mengubah pola aktivitas penangkapan ikan karena nelayan masih bertahan dengan pola penangkapan konvensional (Hikmah, 2018). Sementara itu, pembangunan nonfisik dalam perubahan sosial yang diimplementasikan dalam rekayasa sosial berupa pembatasan segala bentuk interaksi sosial dan penerapan protokol kesehatan serta gaya hidup sehat membentuk perubahan budaya atau gaya hidup masyarakat (Lumintang, 2015). Perubahan sosial tersebut terjadi sebagai dampak perubahan dalam pola interaksi sosial (Yoga, 2018).

Tabel 4 Pendapatan Rumah Tangga Rata-Rata/Bulan
(Table 4 Average Household Income/Month)

Pendapatan RT Rata-Rata Per Bulan (Average Household Income/Month (Rp/IDR))	Persentase Penerima Sebelum Pandemi (Percentage Before Pandemic)	Persentase Penerima saat PSBB (Percentage at PSBB)	Persentase Penerima saat New Normal (Percentage at New Normal)
< 1,000,000	5.56	0	0
1,000,000-1,500,000	33.33	38.89	38.89
1,500,000-2,000,000	27.78	27.78	27.78
2,000,000-2,500,000	22.22	22.22	22.22
2,500,000-3,000,000	11.11	11.11	11.11

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020 (Source: data analysis results,2020)

B. Perubahan Tingkat Kesejahteraan Nelayan

Bantuan langsung tunai Covid-19 sebesar Rp600.000,00/bulan merupakan tambahan penerimaan bagi rumah tangga nelayan tanpa tambahan kegiatan produktif. BLT tersebut dialokasikan untuk kegiatan konsumsi rumah tangga. Dampak positifnya adalah terjadi peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga nelayan yang semula berpendapatan kurang dari Rp1.000.000,00/bulan. Dengan adanya BLT Covid-19, tidak terdapat rumah tangga dengan penerimaan di bawah Rp1.000.000,00/bulan. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan, BLT hanya menjadi jaringan pengaman sosial, bukan sebagai stimulus produktivitas. Untuk menilai keefektifan penggunaan bantuan berupa uang tunai, dapat dilakukan studi lanjut tentang evaluasi kebijakan dengan alat analisis AHP (Longaray et al., - 2015). Berdasarkan informasi pada Tabel 4, diketahui bahwa dengan pemberian BLT Covid-19, tidak ada rumah tangga dengan pendapatan di bawah Rp1.000.000,00. Pemberian BLT Covid-19 sejak pemberlakuan PSBB dan periode sesudahnya telah meningkatkan jumlah golongan penerima pendapatan Rp1.000.000,00—Rp1.500.000,00.

Perubahan penerimaan rumah tangga tersebut dijelaskan pada Tabel 4.

Ringkasan Jenis Perubahan Sosial pada Masyarakat Nelayan.

Tabulasi berikut menjelaskan jenis perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan. Indikator kehilangan pekerjaan sampingan rumah tangga (pekerjaan istri) dan peralihan pekerjaan alternatif tidak mengubah pekerjaan utama informan kunci sebagai nelayan. Perubahan sosial yang menunjukkan perubahan pola perilaku adalah perubahan kultural (gaya hidup sehat, yakni pemberlakuan protokol kesehatan) dan perubahan gaya belajar sebagai konsekuensi belajar daring dengan kendala utama keterbatasan fasilitas dan anggaran tambahan rumah tangga untuk pemenuhan akses internet. Dalam temuan penelitian ini memang belum terdapat perubahan struktur sosial, hanya terdapat perubahan pada fungsi, yakni pekerjaan atau sumber mata pencaharian pada rumah tangga nelayan.

Berdasarkan rekapitulasi perubahan sosial pada Tabel 5, diketahui bahwa perubahan fungsi di masyarakat selain berupa peralihan pekerjaan

Tabel 5 Rekapitulasi Perubahan Sosial
(Table 5 Recapitulation of Social Change)

Jenis Perubahan Sosial (Types of Social Change)	Persentase/ (Percentage) (%)
Kehilangan pekerjaan (loss of a job)	16.67
Peralihan pekerjaan (job change)	12.5
Perubahan pendapatan (income change)	62.5
Perubahan gaya hidup sehat (healthy lifestyle changes)	87.5
Perubahan sistem kerja (change of work system)	50
Perubahan sistem belajar (Changes in the learning system)	91.67

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020 (Source: data analysis results,2020)

Tabel 6 Perubahan Kondisi Ekonomi Lokal
(Table 6 Changes in Local Economic Conditions)

Perubahan pada Kondisi Ekonomi Lokal (Changes in Local Economic Conditions)	Persentase/ (Percentage) (%)
Kehilangan sumber pendapatan tambahan (<i>loss of additional income sources</i>)	16.67
Peralihan pekerjaan (MPA) (<i>change of work (income generating)</i>)	12.5
Meninggalkan pekerjaan utama sebagai nelayan (<i>left his main job as a fishers</i>)	4.17

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020 (Source: data analysis results, 2020)

(upaya mata pencaharian alternatif), juga kehilangan pekerjaan pada 16,67% responden, yakni kehilangan sumber kegiatan produktif tambahan pada dua informan kunci yang istrinya bekerja sebagai guru TK honorer. Fenomena ekonomi berupa kehilangan dan peralihan mata pencaharian ini merupakan perubahan sosial di tingkat individu yang menghasilkan perubahan pada *output* per pekerja. Terjadi penurunan *output* dan pendapatan rumah tangga pada rumah tangga yang kehilangan pekerjaan salah satu anggota keluarga. Kemudian, terdapat pengharapan peningkatan *output* dan pendapatan rumah tangga pada rumah tangga yang memutuskan memilih mata pencaharian alternatif di sektor lain.

Di samping hal tersebut, kebijakan sekolah daring dari rumah mengoptimalkan kembali peran istri sebagai pendidik anak-anaknya di rumah. Hal ini mendukung perubahan kultural berupa perubahan sistem pendidikan menjadi pendidikan daring yang terjadi secara global. Penerapan protokol kesehatan dan kampanye pola hidup sehat yang berlaku secara global dan nasional juga membentuk perubahan budaya, yakni perubahan gaya hidup masyarakat nelayan menjadi lebih sehat dan berhati-hati dengan tujuan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Dalam hal perubahan sistem kerja, hanya terjadi perubahan pada jenis pekerjaan istri yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, yakni pengurangan jam kerja akibat kebijakan kerja dari rumah pada para majikannya (pekerja kantor). Bagi nelayan, pandemi ini cenderung tidak mengubah haluan profesinya sebagai nelayan. Sebanyak 91,67% nelayan tetap bekerja sebagai nelayan. Sebagian kecil mengupayakan mata pencaharian alternatif dengan tidak meninggalkan pekerjaan utama sebagai nelayan. Tabulasi perubahan ekonomi lokal masyarakat nelayan pada Tabel 6 mengindikasikan bahwa tidak terdapat banyak perubahan pada ekonomi masyarakat nelayan. Sebagian kecil responden meninggalkan pekerjaan utama sebagai nelayan dengan alasan belum memiliki modal

untuk menangani kerusakan dan keterbatasan alat tangkap sehingga beralih ke mata pencaharian lain untuk sementara waktu. Secara keseluruhan, perubahan sosial tersebut tidak mencapai kondisi *humanitarian crisis* akibat pandemi Covid-19 (De Beukelaer, 2021).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Faktor penggerak perubahan sosial meliputi faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen berupa kesadaran dan tanggung jawab yang memengaruhi keputusan ekonomi dalam rumah tangga nelayan, sedangkan faktor eksogen berupa program pemerintah yang diterima masyarakat nelayan yang memengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga. Bentuk rekayasa sosial berupa kebijakan pemerintah guna memutus penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut adalah pemberlakuan PSBB, penerapan protokol kesehatan, dan sekolah daring. Rekayasa sosial yang lain berupa program pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19, yakni distribusi BLT Covid-19. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan akibat pandemi Covid-19 adalah perubahan sosial di tingkat individu, yakni perubahan kegiatan produktif, peningkatan jumlah penerimaan rumah tangga, dan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup merupakan bentuk perubahan perilaku masyarakat pada status sosial yang sama jika ditinjau dari waktu yang berbeda. Secara global, perubahan perilaku masyarakat terjadi akibat peraturan-peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk memutus mata rantai Covid-19, antara lain pemberlakuan pola hidup sehat dan pembelajaran daring.

Rekomendasi Kebijakan

Diperlukan kajian lebih lanjut tentang kebermanfaatan atau alokasi penggunaan BLT Covid-19 dan Program Keluarga Harapan yang masih bergulir pada masa pandemi Covid-19

bagi ekonomi rumah tangga nelayan. Kajian lebih lanjut dapat menjadi evaluasi dan rekomendasi (*treatment*) untuk program pemerintah yang efektif bagi produktivitas dan keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan. Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa BLT Covid-19 belum meningkatkan produktivitas sehingga diperlukan upaya dan *monitoring* kelembagaan guna mendukung pengelolaan BLT untuk kegiatan produktif masyarakat nelayan. BLT Covid-19 hadir sebagai jaringan pengaman sosial yang bertujuan membantu aspek konsumsi masyarakat. Namun, pandemi Covid-19 telah mengurangi beberapa sumber mata pencaharian alternatif rumah tangga nelayan. Mata pencaharian alternatif (pekerjaan guru TK dan asisten rumah tangga bagi istri nelayan) hilang atau berkurang akibat kebijakan WFH dan WFO. Dengan demikian, diperlukan mata pencaharian alternatif berbasis sumber daya lokal. Hal tersebut memerlukan dukungan modal dan penguatan kelembagaan. Berkaitan dengan hal itu, Penghulu (Kepala Desa) Lalang dan Penghulu Kayu Ara Permai telah berinisiatif mengajak warganya untuk mengelola sumber daya pertanian secara swadaya dengan menyisihkan sebagian perolehan BLT untuk modal atau input produksi agar dapat menjadi sumber pendapatan alternatif rumah tangga.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis terhadap pembuatan karya tulis ini adalah Fanny Septya sebagai kontributor utama serta Tomi Ramadana, Darwis A.N., dan Rindi Metalisa sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Riau, jajaran pimpinan Kecamatan Sungai Apit, kepala desa/penghulu desa di Kecamatan Sungai Apit, masyarakat nelayan Kecamatan Sungai Apit, pengurus Rumah Khusus Nelayan Desa Teluk Batil, penyuluh pertanian dan perikanan Kecamatan Sungai Apit, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alimah, S., & Mudjiono, M. (2020). Kajian penerapan rekayasa sosial dengan pendekatan berbasis

masyarakat terhadap rencana pembangunan RDNK. *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, 21(2), 63. doi:10.17146/jpen.2019.21.2.5654

Bottema, M. J. M., Bush, S. R., & Oosterveer, P. (2021). Assuring aquaculture sustainability beyond the farm. *Marine Policy*, 132 (October 2020), 104658. doi:10.1016/j.marpol.2021.104658

Coughenour, C. M., & Applebaum, R. P. (1972). Theories of social change. *Contemporary Sociology*, 1(4), 330. doi:10.2307/2063504

De Beukelaer, C. (2021). COVID-19 border closures cause humanitarian crew change crisis at sea. *Marine Policy*, 132 (October 2020), 104661. doi:10.1016/j.marpol.2021.104661

Disman, D., Ali, M., & Syaom Barliana, M. (2017). The use of quantitative research method and statistical data analysis in dissertation: An evaluation study. *International Journal of Education*, 10(1), 46. doi:10.17509/ije.v10i1.5566

Greenwood, J., & Guner, N. (2011). Social change. *Handbook of Contemporary China*, 3485, 51–89. doi:10.1142/9789814350099_0003

Gunawan, H., Suryadi, K., & Malihah, E. (2015). Analisis perubahan sosial budaya masyarakat Desa Cihideung sebagai desa wisata. *Sosietas*, 5(2). doi:10.17509/sosietas.v5i2.1524

Gundelund, C., & Skov, C. (2021). Changes in angler demography and angling patterns during the Covid-19 lockdown in spring 2020 measured through a citizen science platform. *Marine Policy*, 131 (May), 104602. doi:10.1016/j.marpol.2021.104602

Herdiana, D. (2019). Dampak pembangunan perumahan terhadap perubahan sosial masyarakat desa (studi kasus di Desa Jayamekar, Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 14(4), 265. doi:10.14710/pwk.v14i4.20444

Hikmah, H. (2018). Reklamasi di Teluk Jakarta dan perubahan sosial pada masyarakat nelayan di Cilincing Jakarta Utara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(1), 1. doi:10.15578/jksekp.v8i1.6849

Lumintang, J. (2015). *Pengaruh perubahan sosial terhadap kemajuan pembangunan masyarakat di Desa Tara-Tara I. Acta Djurna*, 4(2) .

Kadfak, A., & Linke, S. (2021). Labour implications of the EU's illegal, unreported and unregulated (IUU) policy in Thailand. *Marine Policy*, 127 (July), 104445. doi:10.1016/j.marpol.2021.104445

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/216/2020 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa. (2020).

Longaray, A. A., De Deus Rodrigues Gois, J., & Da Silva Munhoz, P. R. (2015). Proposal for using AHP method to evaluate the quality of services provided by outsourced companies. *Procedia*

- Computer Science*, 55 (Itqm), 715–724.
doi:10.1016/j.procs.2015.07.083
- Pohan, B., & Gunawan, W. (2019). Proses sosial sebagai akar sublimasi masyarakat pedesaan. *Simulacra*, 2(2), 133–147. doi:10.21107/sml.v2i2.6040
- Purnama, T. D., Juliansyah, V., & Chainar. (2020). Pandemi Covid-19, perubahan sosial dan konsekuensinya pada masyarakat. *Ilmu Sosial Dan Humanior*, 25(1), 61–80.
- Qomarudin. (2013). Perubahan sosial dan peran masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Kepulauan Karimun Jawa. *Journal of Educational Social Studies*, 2(1), 41–46.
- Septikawati, I., & Triana Habsari, N. (2014). Perubahan sosial kaum perempuan samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora tahun 1995-2012. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 4(02), 113. doi:10.25273/ajsp.v4i02.831
- Umanilo, M. C. B. (2019). Struktur perubahan sosial dalam masyarakat industri. *October*. doi:10.31219/osf.io/75rwj
- Yoga, S. (2019). Perubahan sosial budaya masyarakat indonesia dan perkembangan teknologi komunikasi. *Jurnal Al-Bayan*, 24(1), 29–46. doi:10.22373/albayan.v24i1.3175